



LAPORAN PELAKSANAAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk/bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di lingkungan Bapelitbang Kabupaten Solok. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan FKP ini. Besar harapan kami agar Laporan FKP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Solok kedepannya.

Arosuka, 24 November 2025
PIK KEPALA BAPELITBANG



NAFRI, ST. MT. M.Sc
NIP. 19790517 200501 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP.....	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Analisis.....	5
3. Rencana Aksi.....	6
D. PENUTUP	
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP ini sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Solok.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Membahas Rancangan Awal RKPD bersama pemangku kepentingan Kabupaten Solok.
- 2) Mendapatkan masukan penyempurnaan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026.

b. Manfaat

1) Secara Umum

- a) Menjaga kualitas dokumen RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c) Keselarasan penyusunan antara: Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Periode 2025-2029.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

- a. Gambaran keuangan daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran;
- b. Rasionalisasi beberapa belanja daerah (mengacu pada INPRES Nomor 1 Tahun 2025);
- c. Identifikasi permasalahan, isu strategis dan tema RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026
- d. Penghimpunan masukan penyempurnaan penyusunan dokumen RKPD 2026 dari pemangku kepentingan.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan:

Hari : Rabu, 12 Februari 2025

b. Tempat Pelaksanaan

Ruang Rapat Bukik Cambai Bapelitbang Kabupaten Solok

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara : Bapelitbang Kabupaten Solok

b. Peserta FKP

1) DPRD Kabupaten Solok

2) Staf ahli Bupati

- 3) Asisten di lingkup Sekretariat Daerah
- 4) Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok
- 5) Camat se-kabupaten solok
- 6) Kepala Bappeda Kab. Kota Tetangga (Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan)
- 7) Instansi Vertikal (Kepala BPS, BNN, Baznas dan Kepala Kantor Kemenag)
- 8) Akademisi Perguruan Tinggi
- 9) Lembaga Profesi/Ormas/LSM/Tokoh Masyarakat
- 10) Tim penyusun RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka.

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.30 s.d 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 s.d 09.45	Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	Dipandu Moderator
09.45 s.d 10.30	Pemaparan dari Kepala Bapelitbang	
10.30 s.d 12.00	Tanggapan dan Diskusi	
12.00 s.d 13.00	ISHOMA	
13.00 s.d 13.30	Pemaparan dari BPS	
13.30 s.d 14.30	Tanggapan dan Diskusi	
14.30 s.d 15.00	Penutupan dan Penandatanganan Berita Acara	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

- a. Identifikasi permasalahan, isu strategis dan tema RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026;
- b. Penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026.

2. Analisis

Analisis permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan, agar pemerintah daerah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan yang berasal dari analisa lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi prediksi terhadap berbagai peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Solok. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari isu-isu strategis yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Solok. Isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Solok guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability) pembangunan di Kabupaten Solok.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Permasalahan pembangunan Kabupaten Solok dapat meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok menyusun RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Keberadaan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara substansial, RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan.

Penyusunan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam penyusunan RKPD ini perlu adanya suatu forum dialog yang difasilitasi oleh Bapelitbang. Forum dialog ini lebih dikenal dengan sebutan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang menggunakan pendekatan teknokratik dan partisipatif. Pendekatan teknokratik sendiri melibatkan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok sementara pendekatan partisipatif melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, diharapkan dapat merumuskan permasalahan, isu strategis dan tema RKPD Kabupaten Solok untuk Tahun 2026 melalui masukan-masukan dan saran yang diberikan oleh seluruh peserta Forum Konsultasi Publik ini.

3. Rencana Aksi

- a. Merumuskan permasalahan, isu strategis dan tema RKPD Kabupaten Solok untuk Tahun 2026;

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait permasalahan, isu strategis dan tema RKPD Kabupaten Solok untuk Tahun 2026, maka Bapelitbang berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Bapelitbang dalam penyempurnaan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Padang - Solok Km. 20 Arosuka Telp. (0755) 31330

Arosuka, 7 Februari 2025

Nomor : 000.7.2.4/126/Bapelitbang-2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Undangan

Yth. (Sebagaimana Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026, maka salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal RKPD bersama pemangku kepentingan Kabupaten Solok yang bertujuan memperoleh masukan penyempurnaan penyusunan dokumen RKPD.

Sehubungan dengan itu, diharapkan kehadiran Saudara dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Februari 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bukit Cambai Bapelitbang
Acara : 1. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026.
2. Hal-hal lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



MEDISON, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
 Nomor : 000.7.2.4/ 126 /Bapelitbang-2025
 Tanggal : 7 Februari 2025

**DAFTAR UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD
 KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026**

NO	UNDANGAN	JUMLAH
A	DPRD Kabupaten Solok	
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	2
3	Ketua Komisi	3
B	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK	
1	Staf ahli Bupati	3
2	Asisten di lingkup Sekretariat Daerah	3
C	KEPALA PERANGKAT DAERAH	
1	Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok	26
2	Camat Se-Kabupaten Solok	14
D	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA TETANGGA	
1	Kepala Bappeda Kota Solok	1
2	Kepala Bappeda Kota Sawahlunto	1
3	Kepala Bappeda Kota Padang	1
4	Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung	1
5	Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan	1
E	INSTANSI VERTIKAL	
1	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok	1
2	Kepala Badan Narkotika Kabupaten Solok	1
3	Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok	1
4	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok	1
F	PERGURUAN TINGGI	
1	Akademisi Perguruan Tinggi	1
G	LEMBAGA PROFESI/ORMAS/LSM/TOKOH MASYARAKAT	
1	Ketua Forum Wali Nagari Kabupaten Solok	1
2	Ketua LKAAM Kabupaten Solok	1
3	Bundo Kanduang Kabupaten Solok	1
4	Ketua Forum anak	1
5	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Solok	1
6	Tenaga Ahli P3MD	1
7	Bunda PAUD	1
8	Koordinator PKH	1
9	Ketua PGRI	1
10	Ketua YAKMI	1

NO	UNDANGAN	JUMLAH
11	Ketua KNPI Kabupaten Solok	1
12	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	1
13	Forum Disabilitas	1
14	Ketua Dekranasda	1
15	Asosiasi Pengusaha Rendang	1
16	Pelaku Pariwisata	1
17	Petani Milenial	1
18	Warsi	1
19	Pimpinan Bank Nagari Cabang Solok	1
20	Pimpinan PT Hansela Berkah Abadi	1
21	Pimpinan PT. Tirta Investama Arosuka	1
22	Pimpinan Sirukam Dairy Farm	1
23	Insan Pers	2
H	Tim Penyusun RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026	20
	Jumlah	100

BERITA ACARA

Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Februari tahun 2025, telah diselenggarakan forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Solok tahun 2026 yang dihadiri oleh Perangkat Daerah sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah pada acara forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026;
2. Pemaparan materi oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok;
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Solok tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II.

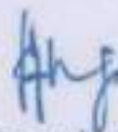
Maka Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026

MENYEPAKATI

- | | | |
|--------|---|---|
| KESATU | : | Permasalahan, isu strategis dan tema RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 tercantum pada LAMPIRAN III; |
| KEDUA | : | Hasil kesepakatan forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. |
| KETIGA | : | Berita acara beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026. |

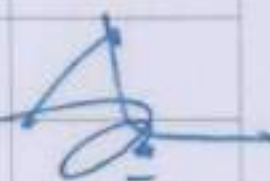
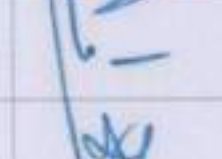
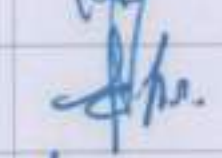
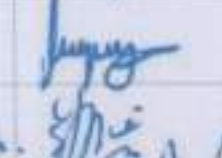
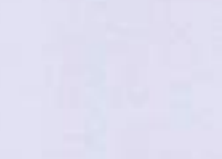
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Arosuka, 12 Februari 2025
Kepala Bapelitbang



Ir. Desmala Ramadhanur

Menyetujui,
Wakil peserta forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026.

No	Nama	Dinas	Jabatan	Tanda tangan
1	Reddy Carlos	Kepurwadana dan Pencatatan Sipil	Kadus	
2	MukhaSi Marcos	Dinas Sosial	Kadus	
3	Ahpi Gurta Turi	DEKUMPP	Kadus	
4	MukhaSi	BPS	Kepala	
5	AGUNG CATIA MID	KEC. LB. JAYA	CAMAT	
6	HARIYANDA A.S. Andri	KETUA Petani MILITAN SUMBAR	Petani MILITAN KAB. Solok	
7	Hafidh Rasy	Ketua FA kab Solok	Ketua	
8	Syopida Yanti, S.E. M.H.	HIPERMI	Ketua kab.	
9	ZOFRAWATI N.L.Y	PORWASA	Ketua umum	
10	Nando Fehmon	KH Warsi	fasilitator	

MASUKAN DAN SARAN UNTUK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026			
NO	PERMASALAHAN MENDESAK YANG HARUS SEGERA DISELESAIKAN	MASUKAN DAN SARAN	PESERTA
1	peningkatan SDM aparatur (ASN), dimana kondisi indeks profesionalitas ASN (IP ASN) Kab solok tahun 2024 adalah 77,13 dengan nilai terendah pada dimensi kompetensi ASN yang relatif rendah yaitu 27,13 (dari maksimal 40). Hal ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik maupun pelayanan administratif lainnya oleh ASN yang ada	untuk meningkatkan nilai pada dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan cara melakukan diklat, seminar, bintek dan work shop bagi pegawai ASN Kab solok	BKPSDM KAB. Solok
2	belum optimalnya penggunaan fitur-fitur aplikasi layanan kepegawaian yang mendukung pelayanan yang mendukung pelayanan publik berbasis digital. Masih terdapat urusan kepegawaian yang dilakukan secara manual	perlu dilakukan pengembangan/ penyempurnaan aplikasi pelayanan kepegawaian	BKPSDM KAB. Solok
3	pengelolaan manajemen ASN belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan indeks sistem ment Kab solok tahun 2024 adalah 252,5 (nilai max 400) dengan aspek terendah pada aspek pengembangan karir yaitu 37,5 (nilai max 120), kemudian pada aspek promosi dan mutasi 15 (nilai max 40), dan aspek sistem informasi 16 (max 24), pemkar Solok belum memiliki aplikasi manajemen talenta PNS (talent pool)	penyediaan anggaran untuk pembangunan/ duplikasi manajemen talenta(talent pool) dan persyaratan lainnya	BKPSDM KAB. Solok
4	pentingnya harmonisasi PERDA trastibun karena ada beberapa klausul pasal yang harus disesuaikan dengan aturan yang secara hirarki lebih tinggi misalkan kutip terbaru	perlunya dukungan anggaran untuk melakukan harmonisais (DPD dan KEMENKUNHAM) untuk merevisi PERDA	POL PP dan DAMKAR
5	kurangnya kualitas SDM aparatur SAPOL PP. Sehingga penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran PERDA BLH optimal	perlu adaanya dksan untuk SAPOL PP dan DAMKAR	POL PP dan DAMKAR
6	keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum (PERDA)	perlu diadakan workshop/ semacam pertemuan/ kolaborasi dengan para tokoh agama	POL PP dan DAMKAR

	masalah	dan tokoh masyarakat	
7	penertiban pedagang kaki lima, parkir kendaraan sepanjang jalan nasional (parkir liar)	perluanya ketegasan pemerintahan daerah (pemberian sanksi)	POL PP dan DAMKAR
8	kurangnya sarana prasarana POL PP dan DAMKAR (contohnya ketersediaan armada)	perluanya pengalokasian anggaran untuk SAPRAN POL PP dan DAMKAR	POL PP dan DAMKAR
9	penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan banyaknya bagan yang berkembang di kawasan danau singkarak, yang menurut data berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh universitas bung hatta	perluanya kerjasama dan koordinasi intensif, antara pemerantas	DDP
10	masih adanya daerah lawan pangan guna perlu di intravensi agar daerah/ nagari tersebut mandiri pangan	koordinasikan lintas sektor antar SKPD	DDP
11	pendidikan adalah investasi masa depan untuk sebuah daerah, angka kemiskinan salah satunya bertambah apabila generasinya tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, disaat beberapa kab/kota memberikan BKK (bantuan keuangan kusus) kepada SMA/SMK, baik untuk pendidikan gratis maupun pakaun gratis untuk kab solok kami berharap perhatian pemkab untuk pendidikan, minimal untuk pengadaan perlengkapan sekolah untuk siswa/siwi dari keluarga kurang mampu/miskin	berikan bantuan bagi siswa/siwi dari keluarga kurang mampu/miskin berikan beasiswa bagi siswa/siwi hebat yang ada di Kab solok baik tingkat DIKDAS, menengah, maupun tingkat perguruan tinggi (terkhusus mereka anak anak hebat tapi dari keluarga kurang miskin)	CABDIN III SUMBAR
12	berikan perhatian untuk pendidikan vokasi berdayakan dan dukungan SMK SMK yang ada di kab Solok, apabila SMK yang berbasis pertanian, peternakan dan pariwisata, agar disaat mereka tamat SMK. Mereka bisa langsung terjun ke dunia usaha, tidak menganggur, sudah banyak kab/kota memberikan BKK ke SMA/SMK untuk kab solok minimal kita lakukan bertahap dari poin yang paling mendesak dan belum di fasilitasi oleh sumbar dana manapun		CABDIN III SUMBAR
13	terkait dengan program penurunan stanting yang ada, masih banyaknya kader posyandu yang belum memahami tugas dan fungsi dalam kegiatan penurunan stanting tersebut	untuk dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi kader-kader yang terlihat ke dalam program penurunan stanting	dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari
14		diadakan pendampingan pendataan oleh SKPD	dinas pemberdayaan

14	masih adanya ego sektoral pada masing-masing lembaga yang ada di nagari	terkait, sehinggadata yang dihasilkan agar dilakukan koordinasi secara berkala untuk mengurai permasalahan yang ada di nagari	masyarakat dan nagari
15	masih banyaknya potensi-potensi yang ada di nagari yang belum digarap maksimal	dapat dilakukan dengan cara sloming atau FGD untuk memunculkan potensi-potensi yang ada di nagari dan juga dapat dilakukan	dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari
16	masih banyak masyarakat kurang mampu melapor ke kecamatan, tidak mendapatkan bantuan/program pemerintah pusat (contoh BLT, PKH, BPJS, DLL)	Pendataan penerimaan manfaat tersebut harus didampingi oleh pihak kabupaten/SKPD terkait	Kec.X Koto Singkarak
17	ada permasalahan sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat yang sudah berlarut-larut	koordinasi tidak terlaksana dengan baik	Kec.X Koto Singkarak
18	tidak maksimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap objek wisata yang ada di nagari	pendataan akan kebutuhan/sarana penunjang wisata tersebut	Kec.X Koto Singkarak
19	banyak terjadi kerusakan infrastruktur yaitu berupa jalan yang merupakan akses dari perekonomian masyarakat terutama di daerah-daerah yang merupakan sebagai potensi usaha yang memberikan pendapatan asli bagi daerah	diharapkan dapat kita prioritaskan untuk perbaikan jalan tersebut serta pemerintah daerah dapat melakukan penguatan pendapatan sebagai salah satu pendapatan asli bagi daerah	kec.x koto diatas
20	masih banyaknya potensi-potensi sebagai sumber pendapatan daerah yang belum tergara secara maksimal	kita lakukan pendataan yang maksimal terhadap sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah	kec x koto diatas
21	masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu belum tersentuh oleh program dari pemerintah pusat, terutama jaminan kesehatan, jaminan pendidikan(KSP), bantuan untuk ekonomi produktif	melakukan validasi data di tingkat daerah, tingkatkan kerja sama lintas sektor, dan perbanyak /kembangkan UMKM	Kec hilir Gumanti
22	masih banyaknya akses transportasi publik yang tidak memadai(jalan/jembatan)	lakukan kerjasama dengan pemerintahan provinsi dan pusat, dan termasuk jalan akses	Kec hilir Gumanti
23	kebutuhan bibit unggul di sektor pertanian		Kec hilir Gumanti
24	masih terdapat pupuk yang langka di tingkat nagari/jorong dan harga yang terlalu mahal	tersedianya pupuk untuk petani dengan harga yang layak danlakukan pengawasan distribusi	Kec hilir Gumanti
25	masih kurangnya areapertanian padi		Kec hilir Gumanti
26		pelaksanaan kegiatan oleh SKPD yang	

kegiatan pelayanan/pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat nagari/jorong dan kecamatan

27	terbuka sebagai penghubung ruang pemerintahan ke rumah warga (pertemuan publik ruang pertemuan) karena ruang pertemuan masih menyatu dengan ruang pelayanan	melibatkan kecamatan untuk diperhatikan lagi penyesuaian dengan anggaran yang ada. Contoh kegiatan perayaan hari jadi, BSC, dll	kec junjung sirih
28	jalan menuju pusat pemerintahan pusat pendidikan jorong banda pusat perekonomian masyarakat (sawah dan ladang)		kec junjung sirih
29	lembah gumanti saat ini sudah menjalani daerah kunjungan wisata di sumbar bahkan dari luar sumbar disamping sebagai daerah penghasil hasil pertanian untuk itu perlu perhatian dari instansi terkait dalam aturan-aturannya yang mendukung keberhasilan dilokasi wisata		kec lembah gumanti
30	terkait tentang dana DAK penyelesaian jalan rimbo data kelanjutan pembangunan untuk tahun 2026 hanya tinggal 5km		kec tiga lurah
32	infrastruktur tentang kelanjutan pembangunan jalan muaro sabio air garabak data		kec tiga lurah
33	program pertanian dari hulu ke hilir	dilaksanakan insyaallah	ketua petani milenial
34	kolaborasi dalam sinergitas		ketua petani milenial
35	edukasi pendidikan pertanian		ketua petani milenial
36	konsentrasi hilirisasi		ketua petani milenial
37	pertanian menjadi sektor pertanian		ketua petani milenial
38	pusat pelatihan pertanian swadaya		ketua petani milenial
39	belum ada pembinaan terarah dari pemerintahan terhadap pengusaha randang di kab solok	pembinaan dan optimalisasi hipermi kab solok yang sudah terbentuk 2024	HIPERMI Kab solok
40	belum adanya dapur produksi yang memenuhi standar BPOM	Pembenahan dan optimalkan peralatan dan fungsi DAPUR RANDANG yang ada di koto	HIPERMI Kab solok
41	belum adanya program prioritas produk randang kab solok go export	prioritaskan program pemda kab solok untuk bisa menjadikan randang kab solok bisa export	HIPERMI Kab solok
42	saat ini ada 16 nagari yang telah memperoleh akses kelola perhutanan sosial. Pengelolaan ini banyak berkaitan dengan pengembangan sektor wisata, usaha UMKM berbasis ekonomi kerakyatan di pinggir nagari dan sektor pertanian.	pemda solok dapat mengahomodir inisiatif ini dengan mendukung melalui kebijakan mendukung masyarakat yang telah memiliki izin perhutanan sosial dalam mengembangkan	

42	penyediaan kasutangan makanan, minuman untuk masyarakat sekitar rumah miliar dari dana BPODLH yang di sumbar akan di salurkan oleh dinas kebutuhan. penerimaan langsung masyarakat kab solok yang telah memiliki izin perhutanan sosial	pengembangan rumah, rumah sederhana, pengurangan rumah lingkungan serta mengurangi kemiskinan. perlu adanya kolaborasi para pihak yang mendukung peningkatan ekonomi dan pengatasan kemiskinan	AKSI 11.00.00
43	arsitektur SPBD	dilakukan secara perlahan ke 3 melibatkan akademisi untuk	DINAS KOMINFO
44		Agar masyarakat kab solok terlayani jaringan internet	DINAS KOMINFO
45	penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG/CKG) untuk seluruh sasaran usia	melengkapi sarana dan prasarana termasuk SDM	DINAS KESEHATAN
46	Kekurangan tenaga dokter di puskesmas sesuai jumlah penduduk di masing- masing wilayah kerja puskesmas	melengkapi kebutuhan melalui rekrutmen tenaga kesehatan khususnya dokter umum/dokter gigi untuk CPNS dan P3K	DINAS KESEHATAN
47	Belum tercapainya UNC kab solok	menambahkan anggaran untuk kepersertaan dan verifikasi dan validasi data untuk tepat sasaran	DINAS KESEHATAN
48	penindak tegaskan dan penanganan isu anak yang lebih inteks	satgas PPKS yang harus diaktifkan di masing-masing instansi pendidikan dan penguatan peran forum anak	FORUM ANAK KAB SOLOK
49	Partisipasi dan kalaborasi dalam MBG baik dari penyuluhan atau partisipasi teknis (lapangan)	hal ini selaras dengan visi forum anak sendiri, yang mana dapat meningkatkan produktifitas forum anak dapat menunjang KLA 9 kabupaten (layar anak) mohon di tambahkan playground untuk ABK yang umum (contoh banding: green park syeh kukut kota solok)	FORUM ANAK KAB SOLOK
50	penyediaan fasilitas rumah anak dan ABK		FORUM ANAK KAB SOLOK

51	pengadaan torlin (mobil pelindungan)	banyak hal yang tak dapat dijangkau oleh kami karena adanya toling, sedangkan kab/kota lainnya adatoning nipun dapat dimanfaatkan di sektor urgensi seperti pendidikan likuasi dan penyaluran MBG, Toning tanpa akomodasi yang banyak dan hemat	FORUM ANAK KAB SOLOK
52	kemudahan peninjauan masalah anak, pemberdayaan perempuan	memberikan wewenang dan meningkatkan kepedulian pemda terkait pada mobilitas forum	FORUM ANAK KAB SOLOK
53	pembangunan infrastruktur prioritas pembangunan daerah, program bupati 1 peningkatan ekonomi potensi nagari (agrofolitan, beras solok). Program bupati 2 pariwisata melalui perbaikan infrastruktur. Pemmasalahan th 2025 dak bid bina marga dan bid SDA	Mohon dukungan untuk bidang bina marga, pembangunan untuk mendukung pariwisata. Sumber daya air, pembangua jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan ekonomi nagari. Cipta karya, tpm dan sanitasi untuk pengentasan kemiskinan. Dan tata ruang, penyusunan RDTR kan, strategi perizinan untuk mendukung rukun pembangunan dan investasi.	DPUPR
54	Berdasarkan permendagri, BTS ADM kab solok kurang lebih 359.040 Ha. Tsd pengurangan luasan kurang lebih 14.800 Ha	agar disinkronisasi data luas APM kab solok. Perbaiki data statistik jumlah SAPRA kesehatan, pendidikan, agama, dll sebagai data untuk pereng.	DPUPR
55	prendahnya PAD dari retribusi uji	kerjasama dengan pd teknis terkait untuk mendorong peranan melakukan uji labor di DPUPR.	DPUPR
56	pembangunan depo arsip. Pengelolaan pembinaan kearpapan yang masih kurang bank disetiap SKPD mampu didupersip selaku LKD, SDM pengelola kearpapan disetiap SKPD maupun di duperap selaku LKD. Dan arsipan masih kurang.		DISPERSIP

57	penambahan kelengkapan sarpras gedung, perpustakaan untuk penerapan akreditasi. Dan penganggaran untuk kegiatan TPBIS (transportasi, perpustakaan berbasis		DISPERSIP
58	tumbuhnya wisata air di beberapa destinasi wisata belum bisa di kenakan pajak/retribusi sehingga belum ada payung hukum/resulasi untuk menindak lanjuti salah tersebut	tersedianya perda pengelolaan wisata berkait retribusi sektor kepariwisataan	DISPARHUD
59	Belum terkelola/ belum tersedia regulasi untuk memedukan pengawasan tentang dampak negatif di pengunjung	tersedianya perda wisata	DISPARHUD
60	masih rendahnya standar pelayanan tentang umat semakin tambah tua kunjungan sehingga potensi PAD semakin meningkat	terlaksananya pelatihan untuk teknis spk pelatihan standar CNSE, peningkatan SDM pelaku elektif	DISPARHUD
61	belum ada wadah/ gudang promosi terhadap hasil-hasil pelaku selera	tersedianya gedung promosi elektif	DISPARHUD

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. ASPEK PEMBANGUNAN SDM DAN SOSIAL BUDAYA

- Belum optimalnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Belum Maksimal Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan
- Penurunan nilai ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat

2. ASPEK PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SDA

- Pertumbuhan ekonomi rendah
- Kemiskinan dan Pengangguran tinggi
- Hilirisasi komoditas belum tercipta
- Sektor pariwisata belum berkembang optimal
- Permasalahan investasi terutama lahan dan keamanan
- Inovasi dan ekonomi digital belum berkembang optimal

3. ASPEK PENGEMBANGAN

- Kemantapan jalan masih rendah dan koneksi antar wilayah belum optimal
- Infrastruktur Irigasi dan Sumber daya air belum optimal
- Cakupan sanitasi dan air minum masih rendah
- Mitigasi kebencanaan
- Timbulan sampah dan Alih fungsi lahan
- Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal

4. ASPEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN

- Reformasi Birokrasi pemerintahan belum optimal
- Kompetensi aparatur rendah
- Digitalisasi pemerintahan belum optimal
- Sinkronisasi kebijakan anggaran di DPRD dengan prioritas Pembangunan

B. ISU STRATEGIS DAERAH

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
3. Pemerintahan yang Melayani dan Berintegritas
4. Efisiensi Anggaran
5. Keamanan Daerah, Demokratisasi, dan inklusifitas, serta stabilitas ekonomi makro daerah
6. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
7. Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan
8. Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur Fly Over Sitinjau Lawik dan Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekan Baru

LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

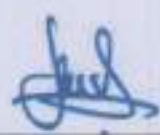
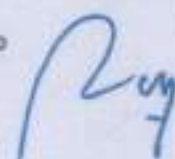
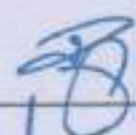
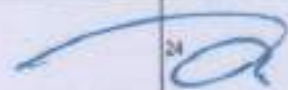
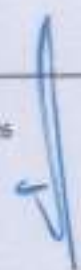
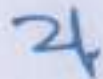
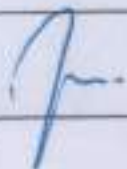
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

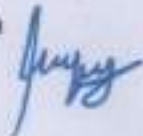
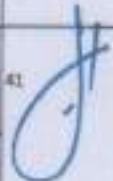
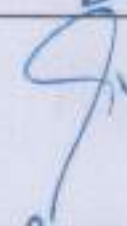
Komplek Perkantoran Bupati Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon : (0755) 31161 - Fax : (0755) 31161

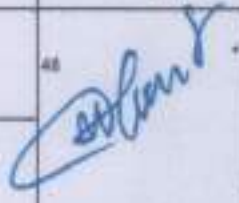
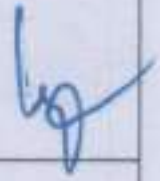
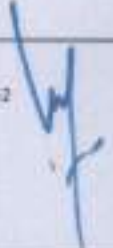
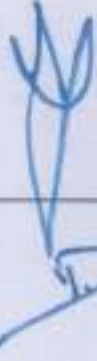
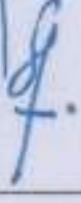
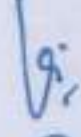
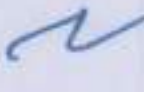
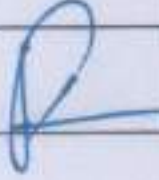
DAFTAR HADIR

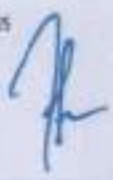
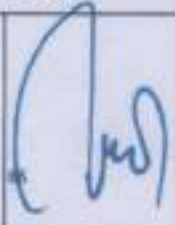
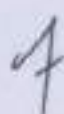
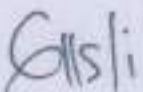
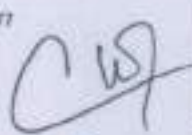
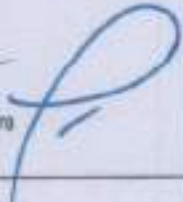
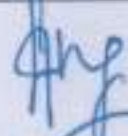
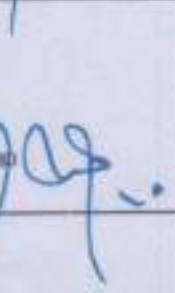
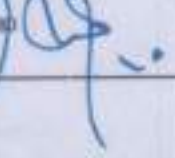
HARI / TANGGAL : Rabu / 12 Februari 2025
WAKTU : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Sapeltbang
ACARA : Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026
SUB KEGIATAN : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

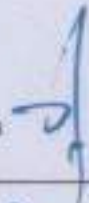
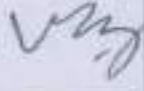
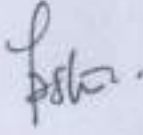
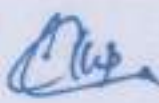
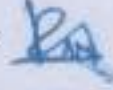
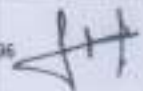
NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	Drs. Aibul Hasril, AM	TA P3MD Kab Solok	1	
2	Teta Minda	Kc. Dikominfo	2	
3	Ahpr Guita Tumi	Ka DKKMPP	3	
4	Muryati, M	Ka PPPKBP3A	4	
5	Nanda R	KM Warsi	5	
6	Herranto	Seban & Kk hygiene	6	
7	Endi Kurnia	Opman	7	
8	Dolfini	Camat Tigo Lura	8	
9	Bahri Gusman	Kominfo	9	
10	Idan Olan	Kec Caciyan	10	
11	Mukhlisati	Seban Legan	11	
12	Andre Hasballah	Kominfo	12	
13	Rechy Anon	Latendelacvii	13	

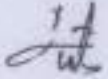
NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN	
14	M. IENGE V	INSPEKTORAT	14. 	
15	Kusnawati	DPK 934		15 
16	Syopida Yanti	Asosiasi Pengusaha Rantau	16 	
17	Zekunawati	Dirjen		17 
18	Muti Riniyanti	Dinkes	18 	
19	Arza S	Dinas		19 
20	Ricce Asriyeni	Kec. Kubung	20 	
21	MUKAWI	BPS		21 
22	Herman Hakim	DLH	22 	
23	YENDRI AGUSTA	DPKPP		23 
24	Muti Rini M	Dinas	24 	
25	Agus Daryanto Gyo	Kec. 10 Kota Goy /ns		25 
26	Dorly Wance Lubis	Kesbang	26 	
27	AKMAL SY	Kota Baru		27 
28	Riko F	Cabdin W. III	28 	
29	Veronica	PT. Harskela		29 
30	Iman Syahrial.	Kjiki	30 	

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN	
31	Darmasari	BKPSDM	31 	
32	Harigada A. Samudra	Petani Milenial Sumbang		32 
33	Hafidh Rauf	Forum Anak Solok	33 	
34	M. Isha Pratomo	Petani milenial		34 
35	HS Yoni Ety	OPVPR	35 	
36	Muliati Diniatia	- " -		36 
37	Mety k.f	"	37 	
38	Nasril Asrari	DPP		38 
39	Weni Daryasa	Kec. X. Kota Dumas	39 	
40	Budi Erman	Kec. Hiliran Gunungati		
41	Supriah	Dinasos	41 	
42	HERI Gunawan	Kesbangpol		42 
43	Geny C	Bum	43 	
44	Zoprawan	Forum		44 
45	Ais Holidi	Dispersi	45 	
46	Umay	Bum		46 
47	Inun E	BRSD	47 	

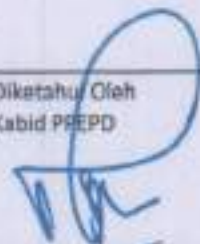
NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
48	Juli H	DISTEMAS	48 
49	Retno Humaira	DPRKPP	49 
50	Indira	Kec. Py Jember	50 
51	Nori Amelia	Kec. JGS / kec	51 
52	Vega Denna Sany	Desa Wersuta	52 
53	Lesmi	Disperbud	53 
54	ATUNG	Comcast UBT	54 
55	WILDA GUMANTI	POL PP & PAMKAT	55 
56	RIFKI C.	DPRKPP & PAMKAT	56 
57	Rizkiel	Kec. Py. Hkky	57 
58	Heru Virbo Asan	Pdam kab Solok	58 
59	Suryadi Tanjung	Pdam kab Solok	59 
60	Ruspel Aiga	Disdikpora	60 
61	Mawardi	Comcast D. Kambor	61 
62	Vivi Aprina	BKD	62 
63	Zurina	Disdikpora	63 
64	Bony	DLH	64 

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN		
65	DEWI FEBRIANTI	SEKT DDA / DESKAND	65		
66	Mulya Liza	BKD.			
67	BOY FITRAYONI	BUKIT SUNDI	67		
68	Surya Dewi	DRUMBOP			
69	APRIZAL	251P	69		
70	M. ARIHAL	BPSO			
71	ALEX	--	71		
72	Yohana	Satpi PP			
73	deswendi	PTSP Naker	73		
74	Yanda Prieta	Kestangpol			
75	Liza Basri	setda.	75		
76	Cici Guspa Dewi	Din Sor			
77	Nasdasheni	PP-PP	77		
78	Vice	Canmiki			
79	Ir. Desmalia. R	Ka. Buplitbang	79		
80	Nafi				
81	T.H viceky M		81		

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN	
82	Deswita	FP. Mudo		
83	Jaka Rahmadana	Kend pph		
84	Subriadi	Ker. Lupa		
85	Kopriazal	JFP Mudo Baya Labang		
86	Dinas Ska Pri	...		
87	Elmawati	- - -		
88	Hartetina	Bapelitbang / JFP Mudo		
89	Nina Grvina	JFP Perencanaan Mudo.		
90	Fastri Prima G	JFP Perencanaan Bapelitbang		
91	Wulu S.	Bapelitbang		
92	Inrani Dwi Adir	Bapelitbang / JFP Perencanaan		
93	Raki Handiua	Baperplan		
94	Timone S.T	THL		
95	Platna Rahmandani	Honorar		
96	Semi Tufita	THL		
97	Deswita Yati	- - -		
98	Wrandi	THL		

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN	
99	Pamadani		99	
100	Indra		100	

Diketahui Oleh
Kabid PREPD



TH. VICENLY MERISKA, ST
NIP. 19850712 200804 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera
Barat

Telepon (0755) 31161 - Faks. (0755) 31161

NOTULA

- Rapat : **Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026**
- Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Februari 2025
- Surat Undangan : Undangan Nomor 000.7.2.4/ 126 /Bapelitbang-2025 tanggal 7 Februari 2025
- Waktu rapat : 09.00 WIB sd Selesai
- Acara : **FKP Ranwal RKPD Kabupaten Solok Tahun 2026**
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Kepala Bapelitbang
- Sekretaris : Kepala Bidang PPEPD Bapelitbang
- Pencatat : Perencana Ahli Pertama Bapelitbang
- Peserta Rapat : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Akademisi Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi/Ormas/LSM/Tokoh Masyarakat dan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Solok tahun 2026.
- Kegiatan Rapat : - Acara dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Solok. Dan menyampaikan materi mengenai Gambaran Keuangan Daerah menghadapi Kebijakan Efisiensi Anggaran.
- Arah kebijakan pemerintah pusat terfokus kepada ketahanan pangan, sehingga arah kebijakan makro daerah harus diarahkan untuk mendukung hal tersebut.
- Untuk RKPD tahun 2026 ini, sudah menggunakan RKPD rinci, sehingga mulai dari tahapan RKPD hingga penetapan APBD, semua kegiatan sudah sama dan tidak bisa diubah dipertengahan tahapan hingga penetapan APBD.
- Untuk itu beberapa prioritas di daerah yang harus diselaraskan dengan prioritas Nasional dan prioritas provinsi adalah sektor Pendidikan, Kesehatan, pelayanan publik, sektor unggulan yang sesuai dengan kondisi daerah (untuk Kabupaten Solok sektor pariwisata, UMKM dan pertanian), dan program unggulan daerah.
- Mengacu kepada INPRES Nomor 1 tahun 2025 dilakukan beberapa rasionalisasi kepada beberapa belanja daerah.

- Pemerintah daerah melaksanakan Pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, daya saing daerah, akses dan kualitas pelayanan public, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha.
- Penyusunan RKPD bertujuan untuk menjabarkan visi, misi dan tujuan Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, mengintegrasikan prioritas Pembangunan daerah dengan prioritas Pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP, menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja PD yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah dan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya daerah.
- Statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS diperlukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun Masyarakat, lintas sectoral, berskala nasional dan makro. Statistik sectoral yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan OPD diperlukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan. Dan ada statistik khusus yang diselenggarakan oleh perorangan/Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, Pendidikan, social budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan Masyarakat.
- Untuk dokumen perencanaan yang berkualitas dibutuhkan data yang berkualitas juga. Data yang berkualitas harus bersifat relevan, akurat, mudah diakses, konsisten, tepat waktu dan mudah ditafsirkan.

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipedomani dan terima kasih

KABID PPEPD



TR. VICELLY MERISKA, ST
NIP. 19850712 200804 2 001

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan







BAHAN PAPARAN FKP RKPD 2026

SCAN ME

LINK DOWNLOAD

<https://bit.ly/RKPDKABSOLOK26>



TARGET DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

URAIAN	APBD 2025	KMK 29 2025	Proyeksi 2026
PENDAPATAN	1.348.108.025.851	1.258.876.888.851	1.248.876.888.851
PENDAPATAN ASLI DAERAH	858.887.754.000	138.987.754.000	138.987.754.000
PENDAPATAN TRANSFER	1.200.121.291.851	1.128.889.134.851	1.128.889.134.851
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			

- KMK 29 2025 : Pemotongan DAK Fisik sebesar Rp. 43.650.423.000 dan DAU peruntukan sebesar Rp. 33.789.346.000
- Tahun 2025 rata-rata Proporsi PAD terhadap Pendapatan sebesar 11,03 persen
- Rata-rata Proporsi Pendapatan transfer terhadap Pendapatan sebesar 98,97 persen
- Artinya Kemandirian Fiskal Kabupaten Solok "Rendah"



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
 Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
 Telepon (0755) 31161 - Faks. (0755) 31161

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
RKPD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik **RKPD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025** oleh Bapelitbang Kab. Solok yang telah ditandatangani pada Tanggal 1 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, maka berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Penyempurnaan penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025 (Sesuai dengan yang ada di Berita Acara Tahun 2024)	Melakukan penyempurnaan penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025 sampai dengan diterbitkannya Perbup Tentang RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025 Target Penyelesaian : 5 bulan setelah selesai dilakukannya forum Konsultasi Publik	Bentuk Tindak Lanjut: Telah dilakukan penetapan terhadap RKPD Tahun 2025 Tanggal 3 Juli 2024 (Perbup No 9 Tahun 2024) Waktu Pelaksanaan : Februari s.d Juli (5 Bulan) Keterangan: Penetapan RKPD Tahun 2025 selesai sesuai dengan target yang ada di kalender perencanaan	Bukti Tindak Lanjut:

